

Pemerintah dan Pengadilan dalam Negara Hukum

Bivitri Susanti

DIKSI (Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi) STH Indonesia Jentera

Menakar Praktik Pembentukan UU dan Tindakan Pemerintah yang Melawan Putusan
Pengadilan

30 Juni 2020

Pertanyaan kunci

- Bagaimana cara membentuk regulasi yang seimbang antara pendekatan hukum dan politik?
- Bagaimana penyusunan regulasi baik di pusat dan daerah agar tidak melanggar putusan pengadilan? Dan apa konsekuensi jika dilanggar?
- Apakah konsekuensi hukum dan politik bagi pemerintah jika kebijakannya melawan putusan pengadilan?

Contoh keputusan pemerintah yang melanggar putusan pengadilan

- Putusan MA atas gugatan petani pengunungan Kendeng dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup terhadap PT Semen Indonesia. Putusan tersebut membuat izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT Semen Indonesia harus dibatalkan. Namun dalam pelaksanaannya, keputusan baru yang dikeluarkan pemerintah justru bertentangan dengan putusan MA tersebut.
- Putusan MA yang menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah pihak tergugat dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan. Pemerintah diminta mengeluarkan peraturan untuk menanggulangi dan menghentikan kebakaran hutan, termasuk melindungi keselamatan warga dan lingkungan hidup. Terkait putusan ini Presiden Jokowi dan para tergugat belum melakukan satupun perintah pengadilan.
- Putusan MA yang membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan per 1 Januari 2020. Namun, dalam Perpres yang baru dibuat terkait iuran BPJS, pemerintah seolah menegasikan putusan MA tersebut.
- Putusan PTUN Jakarta yang menyatakan bahwa presiden melakukan perbuatan melawan hukum terkait pemblokiran atau pelambatan internet di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada Agustus 2019. Hingga sekarang belum terlihat tindakan apa yang dilakukan pemerintah sebagai respon atas putusan tersebut.
- RUU KUHP, menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden.
- RUU Cipta Kerja: 21 putusan MK yang tidak ditindaklanjuti pemerintah, 4 putusan baru ditindaklanjuti sebagian, dan 7 putusan MK tak dipatuhi karena menghidupkan pasal-pasal yang telah dibatalkan MK. Dari rincian itu, terdapat 1 putusan yang masuk ke dalam dua kategori, yakni dipatuhi sebagian dan menghidupkan kembali pasal yang dibatalkan MK (data dari KoDe Inisiatif).

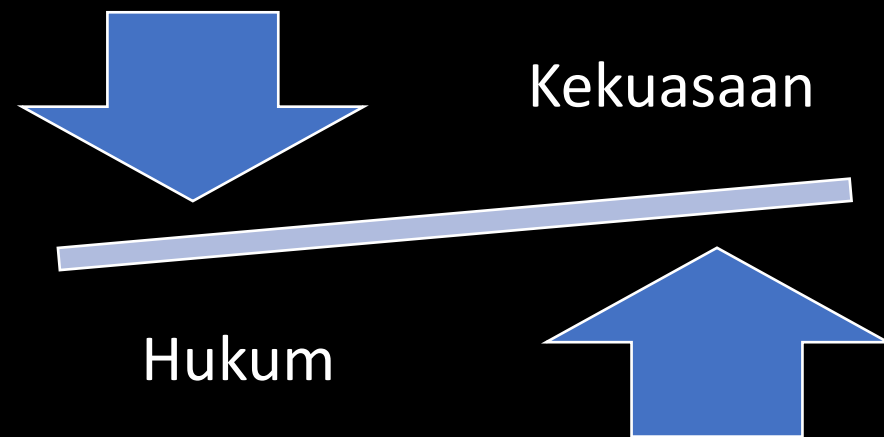
Pola “pelanggaran”

- Dalam UU, pembuat UU (DPR dan presiden) mengabaikan Putusan MK, dengan membuat substansi yang sama.
- Dalam peraturan perundang-undangan di bawah UU, pemerintah membuat peraturan baru yang memuat substansi yang sama.
- Tidak mengeksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Catatan lain: Ada juga, MA dan pengadilan di bawah MA yang tidak mematuhi Putusan MK.

Kerangka analisisnya: Prinsip Negara Hukum

Siapapun sama di hadapan hukum, pemerintah juga tunduk pada hukum. Penekanan pada pelanggaran hukum oleh pemerintah (karena pemegang kekuasaan), yaitu hak asasi manusia dan korupsi/ penyalahgunaan wewenang.



Mengapa?

Untuk melihat *mengapa* pemerintah kadang mengabaikan putusan pengadilan, kita tidak bisa hanya melihatnya dari aspek formal dan teknis. Naif bila melihat soal pelanggaran ini semata sebagai persoalan teknis.

1. Pasti ada tantangan yang sifatnya teknis dan prosedural, misalnya dalam aturan main perancangan (mis. asas-asas pembentukan peraturan) dan metode penyusunan yang melibatkan analisis putusan.
2. Tetapi ada juga persoalan kepentingan politik (iktikad). Persoalan kepentingan politik ini yang pembahasannya cenderung rumit dan membutuhkan upaya pembaruan politik dan demokrasi.
3. Legitimasi pengadilan (MA dan MK) atau kepercayaan pada sistem hukum dan nilai-nilai negara hukum. Ini membutuhkan reformasi hukum.

Secara teknis dan prosedural, bagaimana agar tidak Melanggar Putusan Pengadilan

- **Proses** pembentukan peraturan perundang-undangan yang transparan dan partisipatif.
- **Pengawasan** (ingat, harus ada *checks and balances!*) dari lembaga lain, yang konkrit adalah "teguran" dari Mahkamah Konstitusi terhadap proses legislasi yang ugal-ugalan dalam uji formil.
- **Aktor.** Perancang berkualitas.
- **Lembaga.** Badan Regulasi Nasional
- **Dukungan teknis.** software data, anotasi putusan, panduan Menyusun Perda, Panduan Menyusun peraturan.

Bagaimana dengan persoalan kepentingan politik dan legitimasi pengadilan?

Solusi jangka panjang:

- Reformasi Partai Politik
- Pendidikan Politik warga, sistem pendidikan
- Penguatan negara hukum, konsistensi penegakan hukum.
- Reformasi peradilan dan semua lembaga penegakan hukum (kepolisian dan kejaksaan).



Apa konsekuensi hukum dan politik bagi pemerintah jika kebijakannya melawan putusan pengadilan?

- Batal demi hukum seharusnya, tetapi dalam praktik menjadi “dapat dibatalkan”, yaitu melalui putusan pengadilan.
 - Legitimasi politik dan kepercayaan publik yang terus menurun terhadap lembaga-lembaga hukum, bahkan terhadap demokrasi.
-

Penutup

- Bagaimana cara membentuk regulasi yang seimbang antara pendekatan hukum dan politik? Dengan kerangka negara hukum, titik tekan ada pada kepatuhan semua lembaga negara pada putusan pengadilan.
- Aksi pembaruan diarahkan pada solusi prosedural dan kelembagaan (Proses, aktor, lembaga, dukungan teknis).
- Namun harus ada kerja-kerja jangka panjang untuk mendorong terus prinsip penguatan negara hukum melalui Reformasi Partai Politik, Pendidikan Politik warga, konsistensi penegakan hukum, reformasi pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan.